III. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Malang Tahun 2017

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahanan							Bulan	:					Penanggung jawab/SKPD	Anggaran
NO.	Flogram/ Regiatan	Target	Tahapan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	terkait	(Rp.)
1.	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur																
	Penyempurnaan hasil Analisis Jabatan	Dokumen hasil analisis jabatan yang sudah disempurnakan	a. Penyempurnaan Hasil analisis jabatan sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan													Bagian Organisasi BKD Pokja	65.000.000,00
		1 Dokumen	b. Penerapan hasil penyempurnaan pada jabatan c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring													Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem	
			d. Evaluasi e. Tindak lanjut hasil evaluasi													Manajemen SDM Aparatur	
	2) Penyempurnaan Hasil Analisis Beban Kerja	Dokumen hasil analisis beban kerja yang sudah disempurnakan	a. Penyempurnaan hasil ABK sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan													Bagian Organisasi BKD Pokja	85.000.000,00
		1 Dokumen	b. Penerapan hasil pada jabatan dan kebutuhan pegawai c. Monitoring dan tindak lanjut													Manajemen Perubahan dan Penataan	
			hasil monitoring d. Evaluasi e. Tindak lanjut hasil evaluasi													Sistem Manajemen SDM Aparatur	
	Penyempurnaan standar kompetensi jabatan	Dokumen standar kompetensi jabatan yang sudah	a. Penyempurnaan standar kompetensi jabatanb. Penerapan hasil pada jabatan													Bagian Organisasi BKD	130.000.000,00
		disempurnakan 1 Dokumen	c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring d. Evaluasi													Pokja Manajemen Perubahan	
		1 Boltunion	e. Tindak lanjut hasil evaluasi													dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	

		D /// : .	Indikator	m 1							Bular	1					Penanggung	Anggaran
No.		Program/Kegiatan	Target	Tahapan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	jawab/SKPD terkait	(Rp.)
	4)	Penyempurnaan job grading	Dokumen job grading yang disempurnakan 1 Dokumen	a. Pernyusunan rencana penyempurnaan job grading b. Penyempurnaan job grading untuk seluruh jabatan sesuai dengan hasil evaluasi jabatan c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring penyempurnaan job grading d. Penerapan hasil job grading pada penentuan sistem penggajian e. Monitoring dan tindak lanjut penerapan													Bagian Organisasi BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	75.000.000,00
	5)	Review (penyempurnaan) rencana kebutuhan PNS sesuai beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan SKPD (sesuai dengan perkembangan terakhir)	Dokumen rencana kebutuhan PNS yang sudah disempurnakan	f. Evaluasi g. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2016 dan 2017 a. Review (penyempurnaan) rencana kebutuhan PNS sesuai beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan SKPD (sesuai dengan perkembangan terakhir) b. Penerapan hasil pada													BKD Bagian Organisasi Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013- 2018
	6)	Penyempurnaan sistem rekruitmen PNS (persiapan untuk rekruitmen 2017)	Sistem rekruitmen yang sudah diperbaiki 1 sistem	rekruitmen c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring d. Evaluasi e. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 - 2017 a. Penyempurnaan sistem rekruitmen pegawai (persiapan untuk rekruitmen 2017) b. Uji coba sistem baru													Sistem Manajemen SDM Aparatur BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan	
				, and the second													Sistem Manajemen SDM Aparatur	

No.		Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan							Bulan	1					Penanggung jawab/SKPD	Anggaran
NO.		Program/Kegiatan	Target	ranapan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	terkait	(Rp.)
	7)	Pelaksanaan rekruitmen dengan sistem baru (tahun 2017)	Persentase CPNS yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	a. Pelaksanaan rekruitmen dengan sistem baru													BKD Pokja Manajemen Perubahan	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota
			100%	b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring c. Evaluasi													dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Malang 2013- 2018
				d. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 – 2017														
	8)	Penyempurnaan Penerapan sistem rekruitmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu	Persentase pejabat yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	a. Penyempurnaan Penerapan sistem rekruitmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu													BKD Pokja Manajemen Perubahan	
			90%	b. Penentuan jabatan-jabatan yang akan dibuka													dan Penataan Sistem Manajemen	
				c. Penerapan sistem dalam lingkup internal Pemda d. Monitoring dan tindak lanjut													SDM Aparatur	
				hasil monitoring e. Evaluasi														
				f. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 – 2017														
	9)	Penyempurnaan Hasil Evaluasi Jabatan	Dokumen hasil evaluasi jabatan	a. Lanjutan Penerapan hasil evaluasi jabatan pada Sistem Manajemen SDM Aparatur													Bagian Organisasi BKD	250.000.000,00
			1 Dokumen	b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring													Pokja Manajemen	
				c. Evaluasi d. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 – 2017													Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	
	10)	Review penggunaan hasil assessment kompetensi untuk pengelolaan SDM	Persentase pejabat yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	a. Review penggunaan hasil assessment kompetensi untuk pengelolaan SDM b. Penggunaan hasil assessment													BKD Pokja Manajemen Perubahan	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota
			70%	untuk pengelolaan SDM c. Monitoring dan tindak lanjut													dan Penataan Sistem	Malang 2013- 2018
				hasil monitoring d. Evaluasi													Manajemen SDM Aparatur	
				e. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 – 2017														

N -	Duo ama ma / Wa ari ata ar	Indikator	Talaman							Bulan						Penanggung	Angga	ran
No.	Program/Kegiatan	Target	Tahapan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	jawab/SKPD terkait	(Rp	.)
	11) <i>Updating</i> kebutuhan dan rencana pengembangan PNS untuk tahun 2018-2019	Dokumen rencana pengembangan PNS	a. Penyusunan rencana penyusunan kebutuhan pengembangan PNS													BKD Pokja Manajemen	Sesuai Indikatif Anggaran	
		1 dokumen	b. Penyusunan rencana kebutuhan pengembangan PNS													Perubahan dan Penataan Sistem	RPJMD Malang 2018	Kota 2013-
	12) Lanjutan Pelaksanaan pengembangan PNS sesuai kebutuhan	Persentase pegawai yang mengikuti pengembangan pegawai	a. Pelaksanaan pengembangan PNS													Manajemen SDM Aparatur		
		5,2%	b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitorng pelaksanaan pengembangan PNS															
			c. Evaluasi d. Tindak lanjut hasil evaluasi															
•	13) Penyusunan rencana penempatan dan pola karier PNS	Aplikasi rencana penempatan dan pola karier PNS	a. Penyusunan rencana penempatan dan pola karier PNS, termasuk pola karier jabatan fungsional															
		1 Aplikasi	 b. Penerapan rencana penempatan dan pola karier PNS, termasuk pola karier jabatan fungsional c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring d. Evaluasi 				Su	dah	disu	sun 1	tahu	ın 20)15					
-	14) Lanjutan Penerapan rencana	Persentase pejabat yang	e. Tindak lanjut hasil evaluasi a. Penerapan rencana													BKD	Sesuai	Pagu
	penempatan dan pola karier	sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	penempatan dan sistem pola karier pada Sistem Manajemen SDM													Bagian Organisasi Pokja	Indikatif Anggaran RPJMD	J
		70%	b. Pembaruan data rencana penempatan dan pola karier													Manajemen Perubahan	Malang 2018	2013
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring													dan Penataan Sistem		
			d. Evaluasi													Manajemen		
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi													SDM Aparatur		
	15) Penyusunan sistem manajemen kinerja PNS	Sistem manajemen kinerja	a. Penyusunan rencana pembangunan sistem manajemen kinerja PNS															
		1 sistem	b. Penyusunan Sistem Manajemen kinerja PNS dan pengembangannya c. Uji coba d. Penyempurnaan hasil uji coba				Su	dah	disu	sun 1	tahu	ın 20)15					

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan							Bulan	1				_	Penanggung jawab/SKPD	Anggaran	
NO.	Fiogram/ Regiatan	Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	terkait	(Rp.)	
	16) Lanjutan Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai	Persentase SKPD yang menerapkan Sistem	a. Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai													BKD Bagian	Indikatif	agu
		100%	b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring													Organisasi Pokja	RPJMD K	lam Kota
			c. Evaluasi													Manajemen		13-
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 - 2017													Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen	2018	
																SDM Aparatur		
-	17) Sosialisasi berbagai kebijakan kepegawaian	Jumlah sosialisasi	a. Penyusunan rencana sosialisasi													BKD Pokja		
		3 kali	b. Pelaksanaan Sosialisasi													Manajemen		
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring													Perubahan dan Penataan		
			d. Evaluasi													Sistem		
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi													Manajemen SDM Aparatur		
	18) Penerapan kebijakan kepegawaian	Jumlah kebijakan kepegawaian yang diterapkan	enyusunan rencana penerapan aturan kebijakan kepegawaian yang menjadi kewajiban PNS													SDW Aparatur		
		1 Peraturan	b. Penerapan (setelah melalui sosialisasi)															
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			d. Evaluasi															
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 – 2017															
	19) Lanjutan Pelaksanaan pengembangan kepribadian role model	Persentase Pejabat yang memperoleh pengembangan kepribadian	a. Lanjutan Pelaksanaan pengembangan role model bagi para pejabat															
		100%	b. Pelaksanaan pengembangan role model bagi para pejabat															
			c. Penerapan <i>role model</i> bagi seluruh pejabat															
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			e. Evaluasi											-				
1			f. Tindak lanjut hasil evaluasi															

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan							Bulan	1					Penanggung jawab/SKPD	Angga	ran
NO.	Frogram/ Regiatan	Target	ranapan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	terkait	(Rp	.)
	20) Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan program SDM	Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	a. Monitoring terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program SDM b. Tindak lanjut hasil monitoring													Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan	Sesuai Indikatif Anggaran RPJMD	Pagu dalam Kota
	21) Evaluasi seluruh kegiatan dalam program SDM	Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	Evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program SDM													Sistem Manajemen SDM Aparatur	Malang 2018	2013-
	22) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan	Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi															
	dalam program SDM	80%	b. Perbaikan kegiatan-kegiatan program SDM															
	23) Pelaksanaan berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan sebagai tindak lanjut sebagaimana telah diidentifikasi pada tahun 2016	Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	Pelaksanaan berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan sebagai tindak lanjut sebagaimana telah diidentifikasi pada tahun 2016													BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem		
	24) Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target- target prioritas dimaksud sesuai dengan	Persentase hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi b. Penyusunan prioritasi													Manajemen SDM Aparatur		
	perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program	100%	c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan															
	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemerintah Kota Malang		d. Perbaikan/penyusunan kembali/pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya															
2.	Peningkatan disiplin aparatur																	
	Lanjutan Penerapan sistem penilaian kinerja PNS	Persentase PNS yang memperoleh nilai kinerja dibawah standar 25%	a. Lanjutan Penerapan sistem penilaian kinerja PNS b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring c. Evaluasi d. Tindak lanjut hasil evaluasi													BKD Bagian Organisasi Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem	Sesuai Indikatif Anggaran RPJMD Malang 2018	Pagu dalam Kota 2013-
																Manajemen SDM Aparatur		

D.T.	D /W : 1	Indikator	m.1							Bular	1					Penanggung	Anggaran
No.	Program/Kegiatan	Target	Tahapan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	jawab/SKPD terkait	(Rp.)
	2) Lanjutan Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil	disiplin PNS yang telah ditindaklanjuti	pelaksanaan pembinaan disiplin PNS													BKD Inspektorat Pokja Manajemen	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran
		100%	b. Pembentukan Tim pembinaan disiplin PNS													Perubahan dan Penataan Sistem	dalam RPJMD Kota Malang
			c. Pelaksanaan pembinaan disiplin PNS													Manajemen SDM Aparatur	2013-2018
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan kegiatan														
			e. Evaluasi f. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 – 2017														
3.	Penataan Peraturan Perundang-undangan																
	1) Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dalam asistensi pembahasan	a. Penyusunan rencana kerja asistensi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah													Pokja Penataan Peraturan	350.000.000,00
			b. Pelaksanaan asistensi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah													Perundang- undangan	
		30 Ranperda	c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan kegiatan														
			d. Evaluasi														
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 - 2017														
	2) Workshop Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD	Tingkat partisipasi masyarakat dalam workshop Rancangan	a. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan workshop													Pokja Penataan Peraturan	400.000.000,00
		Peraturan Daerah Inisiatif DPRD	w <i>orkshop</i> Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD													Perundang- undangan	
		80%	c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan kegiatan d. Evaluasi														
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 - 2017														

No.		Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan							Bu	lan				•		Penanggung jawab/SKPD	Anggaran
NO.		Fiogrami Regiatan	Target	Tanapan	1	2	3	4	5	6	7	7 8	;	9	10	11	12	terkait	(Rp.)
	3)	Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah usulan SKPD yang telah dilakukan sinkronisasi dan diharmonisasikan	 a. Penyusunan rencana harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah usulan SKPD b. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah usulan 														Bagian Hukum Pokja Penataan Peraturan Perundang- undangan	850.000.000,00
			30 Ranperda	SKPD c. Penyusunan rekomendasi hasil harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah usulan SKPD								İ		Ì					
				 d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan kegiatan e. Evaluasi f. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 - 2017 								ł		ł					
	4)	Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Peraturan Walikota dan Rancangan Keputusan Walikota	Jumlah Ranperwali dan Rankepwali yang telah dilakukan sinkronisasi dan diharmonisasikan	a. Penyusunan rencana harmonisasi dan sinkronisasi Ranperwali dan Rankepwali usulan SKPD b. Pelaksanaan harmonisasi dan														Bagian Hukum Pokja Penataan Peraturan Perundang- undangan	110.000.000,00
			60 Ranperwali 500 Rankepwali	sinkronisasi Ranperwali dan Rankepwali usulan SKPD c. Penyusunan rekomendasi hasil harmonisasi dan sinkronisasi Ranperwali dan Rankepwali usulan SKPD								ļ		t		ł			
				d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan kegiatan e. Evaluasi f. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 - 2017															
	5)	Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang telah dilakukan sinkronisasi dan diharmonisasikan	a. Identifikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi b. Penyusunan rencana harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah dan										_				Bagian Hukum Pokja Penataan Peraturan Perundang- undangan	350.000.000,00

No.	December /Variates	Indikator	Tahanan]	Bula	n					Penanggung jawab/SKPD	Anggaran
NO.	Program/Kegiatan	Target	Tahapan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	jawab/SKPD terkait	(Rp.)
		20 Perda 20 Perwali	c. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota d. Penyusunan rekomendasi hasil harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota e. Monitoring dan tindak lanjut														
			hasil monitoring pelaksanaan kegiatan f. Evaluasi g. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 - 2017														
	6) Redokumentasi Produk Hukum Daerah	Jumlah dokumen Produk Hukum Daerah yang disusun 5 Dokumen	a. Identifikasi produk hukum daerah yang perlu didokumentasikan kembali b. Penyusunan rencana pendokumentasian kembali produk hukum daerah													Bagian Hukum Pokja Penataan Peraturan Perundang- undangan	150.000.000,00
			c. Pelaksanaan pendokumentasian kembali produk hukum daerah d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan kegiatan e. Evaluasi f. Tindak lanjut hasil evaluasi														
	7) Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	h. Monitoring terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program Penataan Peraturan Perundang-undangan i. Tindak lanjut hasil													Bagian Hukum Pokja Penataan Peraturan Perundang- undangan	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
	8) Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penataan Peraturan Perundang- undangan	Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	monitoring Evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program Penataan Peraturan Perundangundangan														2013-2016

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan							Bular	ı					Penanggung jawab/SKPD	Anggaran
NO.	Program/ Regiatan	Target	Tanapan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	terkait	(Rp.)
	9) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan	Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi														
	dalam program Penataan Peraturan Perundang- undangan	80%	b. Perbaikan kegiatan-kegiatan program Penataan Peraturan Perundang-undangan														
	10) Pelaksanaan berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan sebagai tindak lanjut sebagaimana telah diidentifikasi pada tahun 2016	Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	Pelaksanaan berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan sebagai tindak lanjut sebagaimana telah diidentifikasi pada tahun 2016													Bagian Hukum SKPD terkait Pokja Penataan Peraturan Perundang- undangan	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
	11) Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan	Persentase hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi														
	pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penataan Peraturan Perundang-undangan	100%	b. Pelaksanaan koordinasi kerja sama permasalahan peraturan perundang- undangan														
	Pemerintah Kota Malang		c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan kegiatan d. Evaluasi														
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi														
4.	Penguatan Pengawasan																
	1) Penyusunan kebutuhan	Jumlah Auditor														BKD	Sesuai Pagu
	tenaga fungsional Auditor dan P2UPD	12 orang Jumlah P2UPD 9 orang	Diintegrasikan ke da		kegi igem					_	am F	Pemb	inaan	ı dan		Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas	Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang
	2) Penyusunan rencana pengembangan Auditor dan P2UPD	Persentase Auditor dan P2UPD yang memperoleh peningkatan kompetensi 100%	Diintegrasikan ke dal		kegia igem					_	am :	Pem ¹	binaa	n dan		Kinerja	2013-2018

No.		Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan							Вι	ılan						Penanggung jawab/SKPD	Anggaran
NO.		Flogram/ Regiatan	Target	Tanapan	1	2	3	4	5	6		7	8 9	9	10	11	12	terkait	(Rp.)
	3)	Penyusunan rencana peningkatan penerapan SPIP	Persentase evaluasi SPIP SKPD %	a. Penyusunan rencana evaluasi penerapan SPIPb. Sosialisasi instrumen		S	udah	ı dis	usuı	n/dil	lal	ksan	akan	tal	nun 2	2015		Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran
-	4)	Lanjutan Penerapan SPIP pada SKPD yang belum melaksanakan/belum	Persentase SKPD yang menerapkan SPIP	evaluasi SPIP a. Lanjutan penerapan SPIP di SKPD b. Monitoring dan tindak lanjut														Akuntabilitas Kinerja	dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
		optimal melaksanakan	90%	hasil monitoring c. Evaluasi d. Tindak lanjut hasil evaluasi															
-	5)	Penyusunan rencana monitoring pengelolaan	Opini BPK	tahun 2016 dan 2017 Penyusunan rencana monitoring														BPKAD Inspektorat	
		keuangan untuk seluruh SKPD untuk tahun 2017	WTP															Pokja Penguatan Pengawasan dan	
	6)	Sosialisasi tertib administrasi pengelolaan keuangan	Jumlah Sosialisasi 4 kali	Sosialisasi tertib administrasi pengelolaan keuangan														Akuntabilitas Kinerja	
-	7)	Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan di SKPD tahun 2017	Opini BPK	a. Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan di seluruh SKPD															
-			WTP	b. Tindak lanjut hasil monitoring															
	8)	Sosialisasi LHKPN	Jumlah Sosialisasi 2 kali	Sosialisasi LHPKN			S	udal	h dil	laksa	ana	akan	tahı	un 2	2015			BKD Inspektorat	
	9)	Asistensi Pengisian LHKPN bagi pejabat	Persentase pejabat yang telah menyerahkan LHKPN	bagi pejabat		Sı	ıdah	dila	ksaı	naka	an	tahu	ın 20)15	dan	2016	,	Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja	
			100%	b. Monitoring penyerahan LHKPN															
	10)	Penyusunan rencana pengembangan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti 100%	Penyusunan rencana pengembangan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN			S	udal	h dil	laksa	ana	akan	tahı	un 2	2015			Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja	
	11)	Lanjutan Penerapan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti 100%	Penerapan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN														Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD
	12)	Tindak lanjut pengaduan informasi indikasi terjadinya KKN	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti 100%	Tindak lanjut pengaduan informasi indikasi terjadinya KKN														Kinerja	Kota Malang 2013-2018

No.		Program/Kegiatan	Indikator	Tologram]	Bular	ı					Penanggung jawab/SKPD	Anggaran
NO.		Program/ Regiatan	Target	Tahapan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	terkait	(Rp.)
	13)	Lanjutan Penerapan wistleblower	Persentase jumlah pengaduan yang berhasil ditindaklanjuti	a. Lanjutan Penerapan wistleblower														
			100%	b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring														
				c. Evaluasi d. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2016 dan 2017														
	14)	Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan pada	dilaksanakan sesuai target	a. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring													Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam
		Program Penguatan Pengawasan	80%	b. Tindak lanjut hasil monitoring													Akuntabilitas Kinerja	RPJMD Kota Malang 2013-
	15)	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan	Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan														2018
	16)	Tindak lanjut hasil evaluasi seluruh kegiatan dalam program	Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi														
		Penguatan Pengawasan	80%	b. Perbaikan kegiatan-kegiatan program penguatan pengawasan														
	17)	Pelaksanaan berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan sebagai tindak lanjut sebagaimana tekah diidentifikasi pada tahun 2016	Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	Pelaksanaan berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan sebagai tindak lanjut sebagaimana tekah diidentifikasi pada tahun 2016														
	18)	Penyusunan prioritas baru serta kegiatan- kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud	mnitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru	. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi													Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013- 2018
		sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi	С	. Penyusunan prioritasi . Penetapan kegiatan yang akan dilakukan														
		birokrasi dalam program Penguatan Pengawasan	d	. Perbaikan/penyusunan kembali/pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya														

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan							Bul	an						Penanggung jawab/SKPD	Angga	aran
INO.	Fiogram/ Kegiatan	Target	тапарап	1	2	3	4	. 5	6	7	8	9		10	11	12	terkait	(Rp).)
5.	Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan																		
	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang telah mendapatkan pelatihan	Diintegrasikan ke dala		_				12 Pı ratur	_	ram F	Peml	bin	aan	dan		BKD Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja	Sesuai Indikatif Anggarar RPJMD Malang 2018	
	2) Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja		Diintegrasikan ke dala		_				12 Pı ratur	_	ram I	Peml	bin	aan	dan				
6.	Pengembangan Sistem dan Prosedur Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik																		
	Lanjutan Penyusunan sistem dan prosedur tetap	Jumlah kebijakan terkait sistem dan prosedur tetap	 a. Lanjutan Penyusunan sistem dan prosedur tetap b. Penetapan sistem dan prosedur tetap c. Penerapan sistem dan prosedur tetap d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring e. Evaluasi f. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2016 dan 2017 														Bagian Organisasi Bagian Hukum SKPD terkait Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Indikatif Anggarar RPJMD Malang 2018	n dalam Kota 2013-
	Penyusunan/perbaikan SP (termasuk SP pengawasan dan penyusunan laporan)	Jumlah Standar Pelayanan yang telah disusun sesuai ketentuan	 a. Penyusunan penyempurnaan SP yang ada di SKPD b. Pembahasan SP bersama seluruh stakeholder c. Penerapan SP di SKPD d. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring e. Evaluasi hasil penerapan f. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2016 - 2017 														SKPD terkait Bagian Organisasi Inspektorat Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Indikatif Anggarar RPJMD Malang 2018	

			Indikator								Bular	n					Penanggung	Angga	ran
No.		Program/Kegiatan	Target	Tahapan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	jawab/SKPD terkait	(Rp	
	3)	Penyusunan/perbaikan SOP (termasuk SOP pengawasan dan penyusunan laporan)	Jumlah SOP yang telah diterapkan	a. Penyusunan SOP baru/ penyempurnaan SOP yang ada di SKPD b. Penerapan SOP di SKPD													SKPD terkait Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan	Sesuai Indikatif Anggaran RPJMD	Pagu dalam Kota
			150 SOP	c. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring d. Evaluasi hasil penerapan e. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2016 - 2017													Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Malang 2018	2013-
	4)	Penyusunan Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dokumen Naskah Akademis dan Rancangan Perda 2 Dokumen	a. Perencanaan penyusunan sistem penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu b. Pengkajian penerapan sistem PTSP c. Penyusunan Naskah Akademis dan Ranperda sistem penyelenggaraan PTSP d. Pembahasan dengan melibatkan seluruh seluruh stakeholder e. Tindak lanjut hasil pembahasan f. Penyampaian ke Bagian Hukum untuk proses legislasi g. Legislasi Rancangan Perda				Suc	dah	disu	ısun	tah	un 2	015			BP2T Bagian Hukum Bagian Organisasi Bagian Kerja Sama dan Penanaman Modal Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
	5)	Penyusunan Tata Cara Pencabutan Izin dan Non Izin	Rancangan Peraturan Walikota 1 Ranperwal	a. Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota b. Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota c. Workshop pembahasan Rancangan Peraturan Walikota d. Tindak lanjut hasil workshop e. Penyampaian ke Bagian Hukum untuk proses penetapan		Si	udah	ı dis	usur	n/di	laksa	anal	kan t	ahun	2015				
				f. Penerapan pelayanan Pencabutan Izin dan Non Izin g. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring h. Evaluasi i. Tindak lanjut hasil evaluasi		Sī	udah	dis	usur	n/di	laksa	anal	kan t	ahun	2015				

No	Duo mana / Wania tau	Indikator	Talaanan]	Bulan	1					Penanggung	Anggaran
No.	Program/Kegiatan	Target	Tahapan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	jawab/SKPD terkait	(Rp.)
7.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik																
	Peninjauan lapangan dan penyusunan pertimbangan teknis permohonan izin	Rekomendasi Tim Teknis untuk Penerbitan Izin 11.707 Rekom	a. Penyusunan rencana peninjauan lapangan terhadap permohonan izin b. Pembentukan Tim Teknis Perizinan c. Pelaksanaan peninjauan lapangan dan penyusunan pertimbangan teknis permohonan izin d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring e. Evaluasi f. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2016 – 2017													BP2T Tim Teknis Perizinan Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	255.300.000,00
	2) Peninjauan lapangan dan pengawasan izin	Rekomendasi Tim Pengawasan Perizinan 11.707 Rekom	a. Penyusunan rencana peninjauan lapangan terhadap izin yang diterbitkan b. Pembentukan Tim Pengawasan Perizinan c. Pelaksanaan peninjauan lapangan dan penyusunan pertimbangan teknis hasil pengawasan d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring e. Evaluasi f. Tindak lanjut hasil evaluasi							MANAN						BP2T Tim Pengawasan Terpadu Perizinan Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	255.300.000,00
	3) Pelayanan Mobil Keliling	Layanan izin trayek keliling 4 kali/bulan	tahun 2016 – 2017 a. Penyusunan rencana layanan mobil keliling b. Penyiapan sarana, prasarana dan petuga layanan c. Pelaksanaan layanan d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring e. Evaluasi f. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2016 – 2017													BP2T Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	58.300.000,00

No.		Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan							Bulaı	n					Penanggung jawab/SKPD	Anggaran
NO.		Fiogrami Regiatan	Target	Tanapan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	terkait	(Rp.)
	4)	Lanjutan Penerapan SIM Perizinan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	a. Lanjutan Penerapan SIM Perizinan													BP2T Pokja Penataan Tatalaksana,	145.000.000,00
			90%	b. Monitoring pelaksanaan SIM Perizinan													Penguatan Organisasi, dan	
				c. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring													Peningkatan Kualitas	
				d. Evaluasi terhadap penerapan e. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2016 – 2017													Pelayanan Publik	
	5)	Survei kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan	masyarakat terhadap pelayanan Pemda	kepuasan masyarakat terhadap seluruh jenis pelayanan													Bagian Organisasi SKPD terkait Pokja Penataan	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam
			80%	b. Penyusunan instrumen survei dan uji cobanya													Tatalaksana, Penguatan	RPJMD Kota Malang 2013-
				c. Pelaksanaan survei													Organisasi, dan Peningkatan	2018
				d. Pengolahan data dan analisis hasil survei													Kualitas Pelayanan Publik	
	6)	Pengkajian penerapan	Tingkat kepuasan	e. Penyusunan rekomendasi a. Pengkajian penerapan PTSP														
	,	PTSP	masyarakat terhadap pelayanan Pemda 80%	b. Penyusunan kerangka sistem PTSP c. Penyusunan rencana penerapan a. Penerapan PTSP sesuai rencana				Su	ıdah d	ilaksa	anaka	an tah	nun 20)16				
				d. Monitoring dan tindak lanjut penerapan e. Evaluasi f. Tindak lanjut hasil evaluasi														
	7)	Lanjutan pelaksanaan PTSP untuk <i>quick wins</i>	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemda	a. Lanjutan Penerapan PTSP sebagai <i>quick wins</i>													BP2T SKPD terkait Bagian Organisasi	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam
			80%	b. Monitoring dan tindak lanjut penerapan													Pokja Penataan Tatalaksana,	RPJMD Kota Malang 2013-
				c. Evaluasi													Penguatan Organisasi, dan	2018
	8)	Pengembangan PTSP (quick wins) untuk seluruh jenis pelayanan administratif	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemda	pengembangan PTSP untuk seluruh jenis pelayanan administratif													Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
			80%	b. Penyiapan PTSP (sistem, mekanisme kerja, penggunaan teknologi informasi, SDM, sarana dan prasana, dst.)														

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan							Bulan	1					Penanggung jawab/SKPD	Anggaran
110.	1 Togram/ Regiatan	Target	Tanapan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	terkait	(Rp.)
			c. Pelaksanaan PTSP														
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring														
			e. Evaluasi													<u> </u>	
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi							2018							
	9) Penerapan teknologi informasi	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemda	b. Penerapan teknologi informasii pada jenis pelayanan yang masuk PTSP dan menjadi <i>quick</i> wins													BP2T Dinas Kominfo Pokja Penataan Tatalaksana,	
		80%	c. Monitoring dan tindak lanjut penerapan													Penguatan Organisasi, dan	
			d. Evaluasi													Peningkatan Kualitas	
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi							2018						Pelavanan Publik	
	10) Monitoring dan evaluasi pelayanan publik	Persentase Unit Pelayanan yang telah melakukan pelayanan sesuai standar	a. Penyusunan rencana pelaksanaan monev ke Unit Pelayanan dalam rangka pelayanan publik													Bagian Organisasi Inspektorat Pokja Penataan Tatalaksana,	
			b. Pembentukan Tim Monev pelayanan publik													Penguatan Organisasi, dan	
			c. Penetapan parameter monev pelayanan publik													Peningkatan Kualitas	
			d. Pelaksanaan monev pelayanan publik													Pelayanan Publik	
			e. Monitoring dan tindak lanjut penerapan														
			f. Evaluasi														
	44) 36 11 1		g. Tindak lanjut hasil evaluasi							2018						D 11 D	
	11) Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan pada Program Peningkatan	Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Monitoring terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik													Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota
	kualitas Pelayanan Publik	80%	b. Tindak lanjut hasil monitoring													Peningkatan	Malang 2013-
	12) Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik	sesuai target	Evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik													Kualitas Pelayanan Publik	2018
	13) Tindak lanjut hasil evaluasi seluruh kegiatan dalam program	Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi														
	Peningkatan kualitas Pelayanan Publik	80%	b. Perbaikan kegiatan-kegiatan program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik														

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan							Bular	1					Penanggung jawab/SKPD	Anggaran
NO.	riogiani/ Kegiatan	Target	Tanapan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	terkait	(Rp.)
	14) Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kota Malang	Persentase hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi b. Penyusunan prioritasi c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/penyusunan kembali/pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya													SKPD terkait Bagian Organisasi Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
8.	Pelaksanaan Pengkajian dan Penerapan Standar Manajemen Mutu																
	1) Sertifikasi Standar Manajemen Mutu ISO 9001-2008	Persentase Unit Pelayanan yang telah memiliki Sertifikat ISO 9001:2008	a. Penyusunan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 b. Implementasi ISO 9001 : 2008 c. Audit Internal													SKPD penyelenggara Pelayanan Publik Pokja Penataan	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota
		40%	d. Perbaikan hasil audit internal													Tatalaksana, Penguatan	Malang 2013- 2018
			e. Rapat Tinjauan Manajemen													Organisasi, dan	2010
			f. Audit Eksternal/Sertifikasi													Peningkatan Kualitas Pelayanan	
			g. Tindakan perbaikan hasil Audit Sertifikasi														
	2) Pemeliharaan Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2008	Persentase Unit Pelayanan yang telah memiliki Sertifikat	a. Review dokumentasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008													SKPD penyelenggara Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam
		ISO 9001:2008	b. Implementasi ISO 9001 : 2008													Pokja Penataan	RPJMD Kota
		40%	c. Audit Internal													Tatalaksana, Penguatan	Malang 2013- 2018
			d. Perbaikan hasil audit internal													Organisasi, dan	2010
			e. Rapat Tinjauan Manajemen													Peningkatan	
			f. Audit Eksternal/Sertifikasi													Kualitas Pelayanan	
			g. Tindakan perbaikan hasil Audit Sertifikasi														

No.		Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan					_		Bula	n					Penanggung jawab/SKPD	Anggaran
110.		i Togrami, Kegiatan	Target	Tanapan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	terkait	(Rp.)
9.		ataan Administrasi pendudukan																
	1)	Pelayanan administrasi kependudukan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kependudukan	a. Pelayanan administrasi kependudukan b. Monitoring dan tindak lanjut													Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pokja Penataan	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-
			90%	pelaksanaan													Tatalaksana,	2018
				c. Evaluasi d. Tindak lanjut hasil evaluasi							2018	2					Penguatan Organisasi, dan	
	2)	Penerapan SIM data base	SIM data base	a. Penerapan SIM data base							7010						Peningkatan	
	2)	kependudukan	kependudukan	kependudukan													Kualitas Pelayanan Publik	
		_	1 sistem	b. Monitoring pelaksanaan SIM data base kependudukan														
				c. Tindak lanjut terhadap hasil														
				monitoring														
				d. Evaluasi terhadap penerapan e. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi tahun 2016 - 2017														
	3)	Pengelolaan Maintenance Jaringan dan alat-alat Pelayanan Administrasi kependudukan	Jaringan dan alat-alat Pelayanan Administrasi kependudukan	maintenance jaringan dan alat- alat pelayanan administrasi kependudukan b. Identifikasi <i>Trouble Shooting</i> jaringan														
			1 Jaringan Pelayanan Administrasi kependudukan	c. Maintenance jaringan dan alat- alat pelayanan administrasi kependudukan d. Monitoring dan tindak lanjut pelaksanaan			S	Suda	ıh dil	laksa	anak	an ta	thun	2015	5			
				e. Evaluasi f. Tindak lanjut hasil evaluasi														
	4)	Pengembangan Sistem Informasi Antrian dan Pantauan Pelayanan	Sistem Informasi Antrian dan Pantauan Pelayanan 1 sistem	a. Penyusunan rencana pengembangan Sistem Informasi Antrian dan Pantauan Pelayanan b. Persiapan sarana dan prasaran														
				Sistem Informasi Antrian dan Pantauan Pelayanan c. Uji coba			S	ada	ıh dil	laksa	anak	an ta	hun	2016)			
				d. Penyempunaan hasil uji coba														
				e. Penerapan Sistem Informasi Antrian dan Pantauan Pelayanan														

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan							Bula	n		1	,	_	Penanggung jawab/SKPD	Angga	
110.	1 Togram, Regiatari	Target	Tanapan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	terkait	(Rp.	.)
			f. Monitoring dan tindak lanjut penerapan		•	•	•											
			g. Evaluasi															
			h. Tindak lanjut hasil evaluasi															
,	5) Monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi kependudukan	Dokumen hasil monev dan pelaporan administrasi kependudukan	a. Penyusunan rencana monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi kependudukan													Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sesuai Indikatif Anggaran RPJMD	Kota
		2 Dokumen	 Monitoring terhadap pelaksanaan seluruh pelayanan administrasi kependudukan 													Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan	Malang 2018	2013-
			c. Evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh pelayanan administrasi kependudukan													Organisasi, dan Peningkatan Kualitas		
			d. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi													Pelayanan Publik		
			e. Penyusunan pelaporan administrasi kependudukan															
10.	Quick Wins					I												
	Pengembangan sistem informasi pelayanan kependudukan di Kelurahan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kependudukan di Kelurahan	a. Identifikasi Kelurahan untuk penerapan sistem informasi pelayanan kependudukan berbasis online (diselaraskan dengan kegiatan nomor 1 Program Penataan Administrasi Kependudukan)				Sud	lah d	lilaksa	anaka	an tah	nun 20)15					
		90%	b. Penyusun sistem									nun 20						
			c. Uji coba sistem									un 20						
			d. Penyempurnaan sistem e. Penerapan sistem									un 20 un 20						
		% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target	f. Monitoring pelaksanaan sistem									iun 20				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
		90%	g. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring				Sud	dah d	lilaksa	anaka	an tah	nun 20)16			Dinas Kominfo Kelurahan		
			h. Evaluasi terhadap penerapan sistem				Sud	dah d	lilaksa	anak	an tah	un 20	16	1	.	Pokja Penataan Tatalaksana,		
			i. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi													Penguatan Organisasi, dan Peningkatan	Sesuai Indikatif	Pagu
			j. Perbaikan terhadap sistem untuk pelaksanaan tahun berikutnya													Kualitas Pelayanan Publik	Anggaran RPJMD Malang 2018	dalam Kota 2013-

No.	Dua mana /Va mi a ta m	Indikator	Talagram	Bulan	Penanggung jawab/SKPD	Anggaran
No.	Program/Kegiatan	Target	Tahapan	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	jawab/SKPD terkait	(Rp.)
	Penerapan pelayanan perizinan pararel Pengkajian pelayanan perizinan pararel			Sudah dilaksanakan tahun 2015		
	b) Penentuan jenis pelayanan yang dapat diintegrasikan dalam pelayanan perizinan pararel			Sudah dilaksanakan tahun 2015		
	c) Penyusunan rancangan pelayanan perizinan pararel			Sudah dilaksanakan tahun 2015		
	d) Uji coba			Sudah dilaksanakan tahun 2015		
	e) Penyempurnaan hasil uji coba			Sudah dilaksanakan tahun 2015		
	f) Sosialisasi			Sudah dilaksanakan tahun 2015		
	g) Lanjutan Penerapan pelayanan perizinan pararel	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan pararel	Penerapan pelayanan perizinan pararel	Sudah dilaksanakan tahun 2016		
	h) Monitoring	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target	(1) Monitoring	Sudah dilaksanakan tahun 2016		
	i) E1i	90%	(2) Tindak lanjut hasil monitoring	Sudah dilaksanakan tahun 2016		
	i) Evaluasi j) Pemeliharaan dan pengembangan pelayanan perizinan pararel		(1) Pemeriharaan pelayanan perizinan pararel yang sudah berjalan baik (2) Pengembangan pelayanan perizinan pararel untuk jenisjenis pelayanan baru (3) Penerapan pelayanan perizinan pararel	Sudah dilaksanakan tahun 2016	BP2T Bagian Organisasi Bagian Hukum Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013- 2018

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan Penanggung Anggaran jawab/SKPD
110.	1 Tograni/ Kegiatan	Target	Tanapan	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jawab/SKPD (Rp.)
11.	Zona Integritas Menuju WBK/WBBM			
	1) Penandatanganan Pakta Integritas	Jumlah SKPD yang telah menandatangani Pakta Integritas 100 SKPD	Penandatanganan Pakta Integritas	Sudah dilaksanakan tahun 2015 Sudah dilaksanakan tahun 2015 Sudah dilaksanakan tahun 2015 Sudah dilaksanakan tahun 2015 Pokja Penguatan Pengawasan dan RPJMD Kot Malang 2013
	2) Penyiapan SKPD sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Jumlah SKPD yang disiapkan untuk ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM 1 SKPD	Penyiapan 1 SKPD sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Kinerja 2018
	3) Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM 1 SKPD	Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	
	4) Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di 9 SKPD yang baru ditetapkan untuk menerapkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM tahun 2017	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemda 80%	a. Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di 8 SKPD b. Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di 1 SKPD tahun 2017	
	5) Monitoring dan Evaluasi	Persentase aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target	a. Monitoringb. Evaluasi	Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja
	6) Pelaksanaan perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka Zona Integritas Menuju WBK/WBBM untuk menjaga konsistensi	yang dilaksanakan sesuai target	 a. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi b. Perbaikan terhadap sistem untuk pelaksanaan tahun berikutnya 	Inspektorat Sesuai Pag SKPD terkait Indikatif Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja 2018
	perbaikan berkelanjutan 7) Penyiapan SKPD lain sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemda	a. Penyusunan rencana penetapan Zona Integritas menuju WBK/WBBM untuk SKPD lainnya b. Penetapan SKPD untuk menerapkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Inspektorat SKPD terkait Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja

Na	Duo mana /Vo minto n	Indikator	Telegran							E	Bula	ın						Penanggung	Angga	ran
No.	Program/Kegiatan	Target	Tahapan	1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	1	0	11	12	jawab/SKPD terkait	(Rp	.)
12.	Penataan Ketatalaksanaan																			
	Penataan ketatalaksanaan yang terkait dengan pelayanan dalam rangka mendukung pelaksanaan quick wins	Persentase dari jumlah kebijakan ketatalaksanaan baru yang diterbitkan sebagai pengganti kebijakan	a. Identifikasi berbagai peraturan perundangan daerah yang dipandang kurang mendukung pelaksanaan dan pelaksanaan quick wins b. Penyusunan rencana									an tal						Bagian Organisasi Bagian Hukum SKPD terkait Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan	Sesuai Indikatif Anggaran RPJMD Malang 2018	Pagu dalam Kota 2013-
		ketatalaksanaan yang dipandang kurang mendukung pelaksanaan pelayanan	perubahan untuk peraturan yang dipandang kurang mendukung pelaksanaan dan pelaksanaan <i>quick wins</i> d. Penetapan kebijakan															Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
	Penyempurnaan e- procurement		e. Implementasi a. Penyempurnaan e-procurement b. Lanjutan penerapan e-procurement c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring d. Evaluasi e. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2017				Su	ıdal	h dila	aksa	nak	can tal	nun 2	2016				LPSE ULP Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
13.	Penguatan dan Penataan Organisasi																	, and the second		
	Penataan organisasi yang terkait dengan pelayanan dalam rangka mendukung pelaksanaan quick wins	Persentase organisasi Perangkat Daerah yang ditata	a. Lanjutan pelaksanaan perubahan kebijakan yang dianggap menghambat pelayanan dan menghambat penerapan quick wins b. Monitoring c. Tindak lanjut hasil monitoring d. Evaluasi e. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2016 – 2017															Bagian Organisasi SKPD terkait Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Indikatif Anggaran RPJMD Malang 2018	Pagu dalam Kota 2013-

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan						F	Bulan						Penanggung jawab/SKPD	Anggaran
110.	1 Togram/ Kegiatan	Target	Tanapan	1	2	3	4 5	5	6	7	8	9	10	11	12	terkait	(Rp.)
	Penataan terhadap tugas dan fungsi yang tumpang tindih	Persentase kasus tumpang tindih tugas dan fungsi yang diselesaikan	Penyusunan rencana penataan terhadap tugas dan fungsi dengan dasar hasil pemetaan proses bisnis				Sudal	h dil	laksa	anaka	n tahı	un 20)15			Bagian Organisasi SKPD terkait Pokja Penataan Tatalaksana,	
		80%	b. Perumusan penataan terhadap tugas dan fungsi yang tumpang tindih (termasuk menata kelembagaan)				Sudal	h dil	laksa	anaka	n tahı	un 20)15			Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas	
			c. Penerapan hasil penataan													Pelayanan Publik	
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring														
			e. Evaluasi														
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2016 – 2017														